



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EDISI XXIV

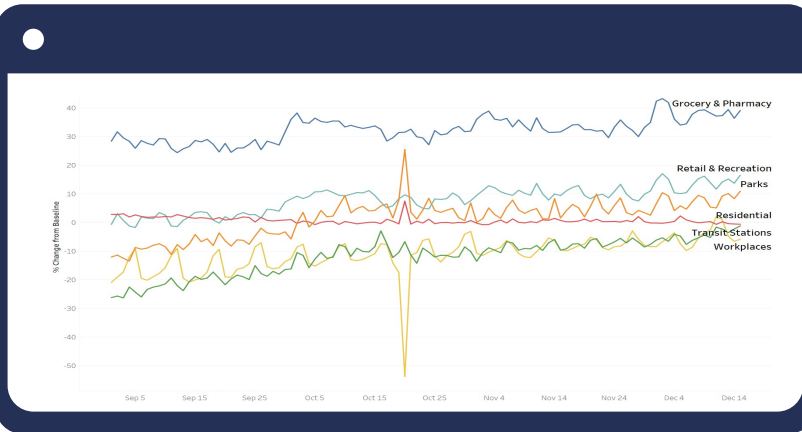
LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 3 – 17 Desember 2021



Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah

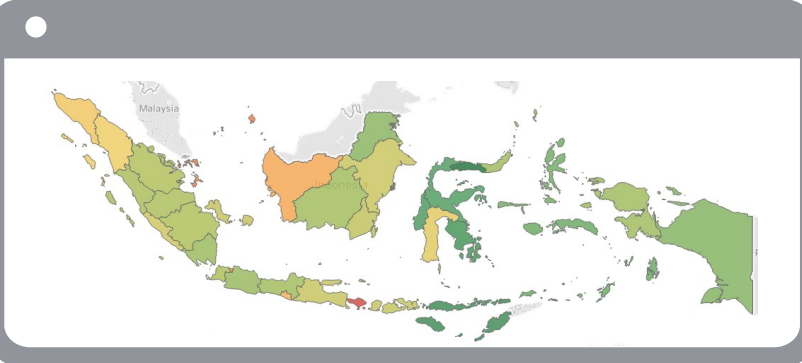
KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH



- Berdasarkan *mobility index**, aktivitas **perekonomian** selama 1 September s.d. 15 Desember 2021 di seluruh sektor mengalami peningkatan, kecuali di **residential** yang cenderung menurun sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah. Meskipun aktivitas *transit stations* dan *workplaces* sudah mengalami peningkatan, namun masih lebih rendah dibandingkan kondisi *baseline* di awal 2020.

- Sebagian besar wilayah sudah mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan *baseline*, meskipun wilayah seperti Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jakarta, dan DIY masih belum kembali kondisinya seperti *baseline*.

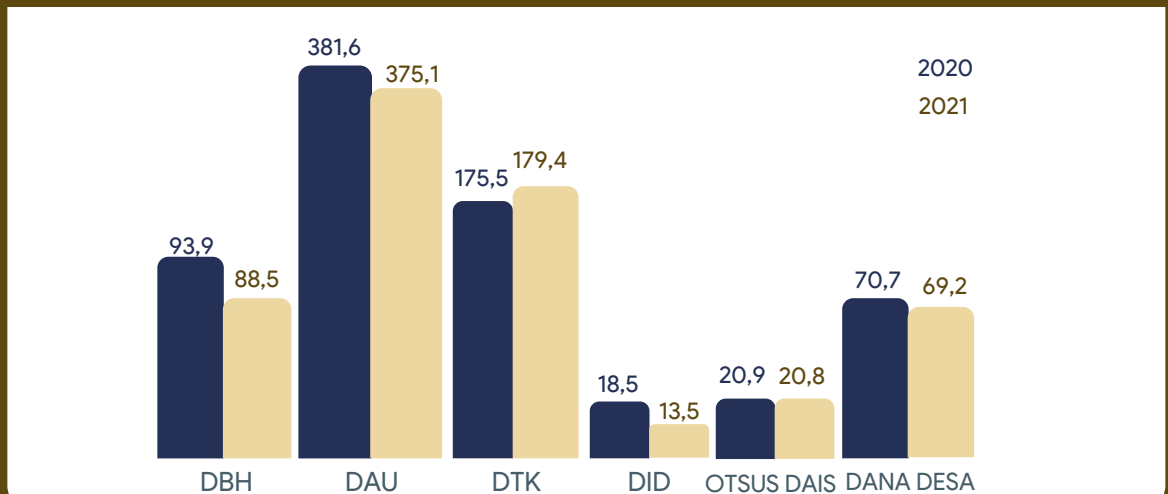
*Data google mobility



KINERJA TKDD DAERAH

Grafik TKDD

Realisasi TKDD s.d. 17 Desember 2021 YoY (dalam Triliun)

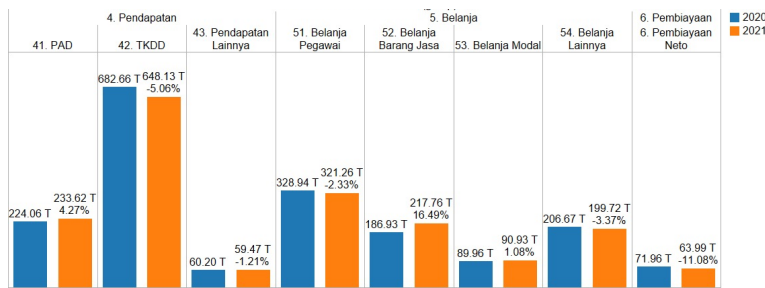


- Secara YoY, realisasi TKDD s.d. 17 Desember 2021 sebesar Rp746,5 T mengalami **penurunan 1,9%** dibandingkan realisasi s.d. 17 Desember 2020 sebesar Rp761 T.
- DAU mengalami **penurunan sebesar 1,7%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021. Sedangkan DBH mengalami **penurunan sebesar 5,8%**, DTK **naik 2,3%**, dan Dana Desa **menurun sebesar 2,1%**.
- Realisasi BLT ke Rekening Kas Desa sebesar **Rp18,29 T** kepada **5,55 juta KPM**.

KINERJA FISKAL DAERAH

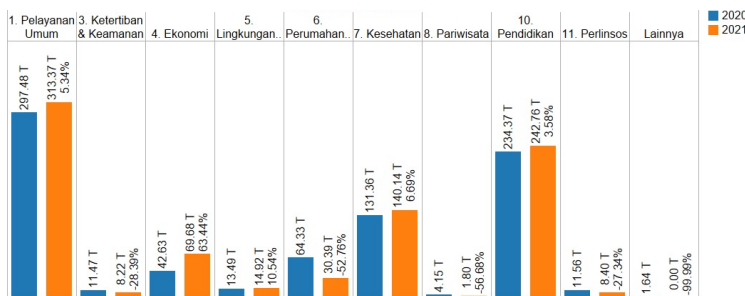
Grafik 1

Realisasi APBD s.d. November 2021 YOY



Grafik 2

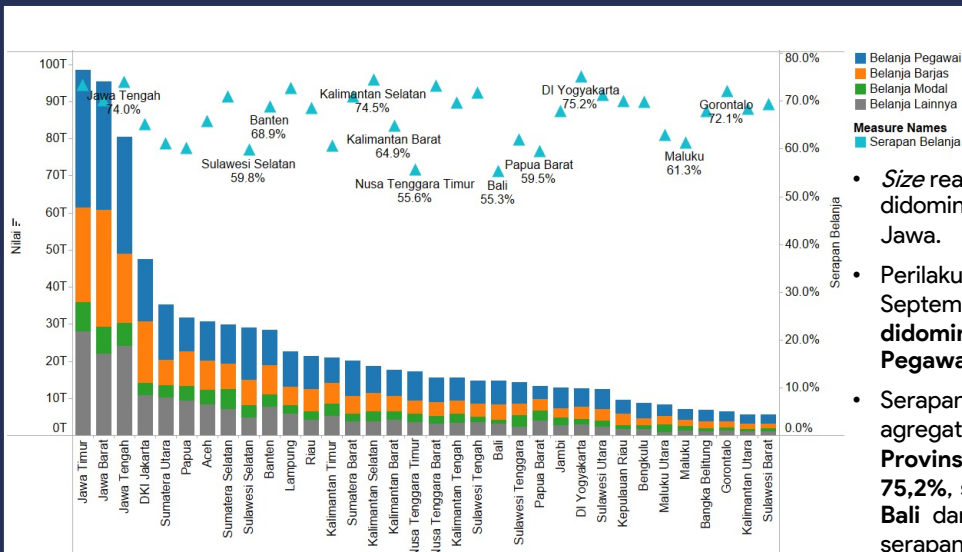
Realisasi APBD s.d. November 2021 YOY



- Realisasi Pendapatan terkontraksi sebesar 2,66% secara YoY dari Rp966,92 T menjadi Rp941,22 T. Penurunan terbesar di TKDD sebesar 5,06%, namun realisasi PAD sudah mengalami kenaikan secara YoY sebesar 4,27%.
- Realisasi Belanja sudah mengalami kenaikan sebesar 2,11% secara YoY dari Rp812,50 T menjadi Rp829,67 T, dengan kenaikan tertinggi di Belanja Barang dan Jasa sebesar 16,49%.
- Pembiayaan Neto turun 11,08% secara YoY yang sumber utamanya adalah penurunan di Penggunaan SILPA TA Sebelumnya sebesar 18,01% dari Rp76,82 T menjadi Rp62,98 T, sedangkan Penerimaan Pinjaman justru naik sebesar 205,97% dari Rp2,87 T menjadi Rp8,80 T.
- Fungsi yang mengalami penurunan realisasi terbesar adalah Pariwisata sebesar 56,68% dan Perumahan & Fasum sebesar 52,76%.
- Fungsi Ekonomi dan Lingkungan Hidup merupakan fungsi dengan peningkatan YoY tertinggi, yaitu berturut-turut sebesar 63,44% dan 10,54%.

Grafik 3

*Realisasi s.d. September 2021 bersifat sementara per 17 Desember 2021

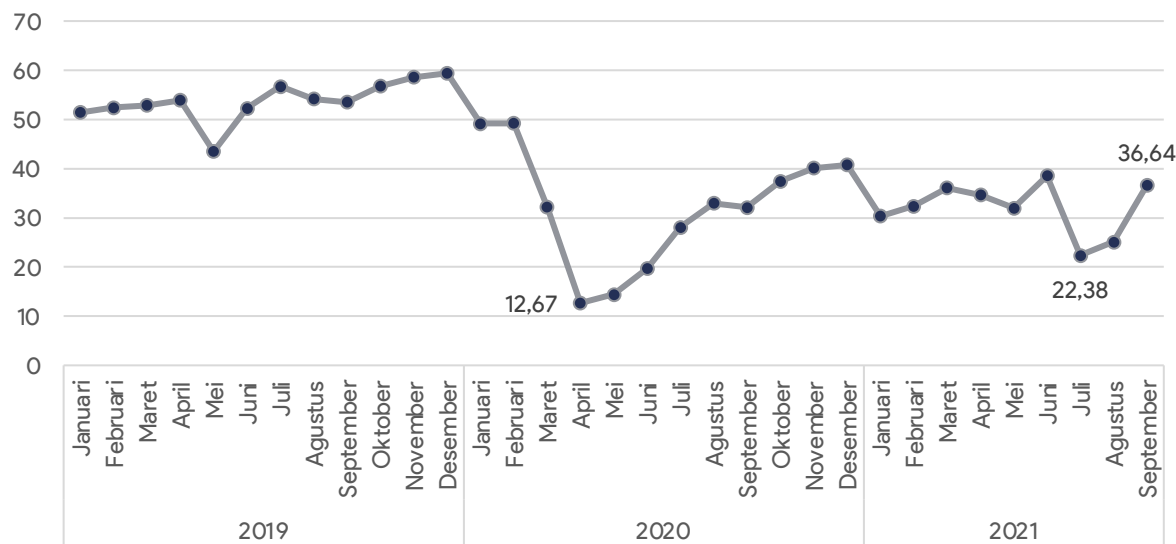


- *Size* realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.
- Perilaku belanja s.d. September 2021 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.
- Serapan belanja secara agregat tertinggi ada di Provinsi DIY sebesar 75,2%, sedangkan Provinsi Bali dan NTT mempunyai serapan belanja agregat terendah sebesar 55,3% dan 55,6%.

KINERJA DAERAH

Salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata. Hal ini karena upaya pengendalian penyebaran Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan mobilitas, sehingga berdampak pada dunia pariwisata.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang (%)



Sumber: BPS (diolah)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihatnya adalah dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang terjun bebas pasca masuknya virus Covid-19 di bulan Maret 2020. Hal ini terus turun hingga April yang menyentuh angka 12,67% dan kemudian mulai kembali naik meskipun jauh dibawah capaian TPK di masa sebelum pandemi. Pada Juli 2021, pada saat dilaksanakannya PPKM Darurat pasca merebaknya varian delta, TPK kembali turun hingga menyentuh angka 22,38% dan kemudian mulai naik kembali di Agustus dan September.

Secara spasial, daerah yang sektor pariwisata cukup besar, mengalami penurunan TPK signifikan selama pandemi, seperti DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara yang mengalami penurunan TPK lebih dari 50%. Namun demikian, kemampuan recovery secara spasial masih terjadi ketimpangan, khususnya Bali yang masih memiliki kenaikan TPK masih sangat rendah dibandingkan daerah lainnya.

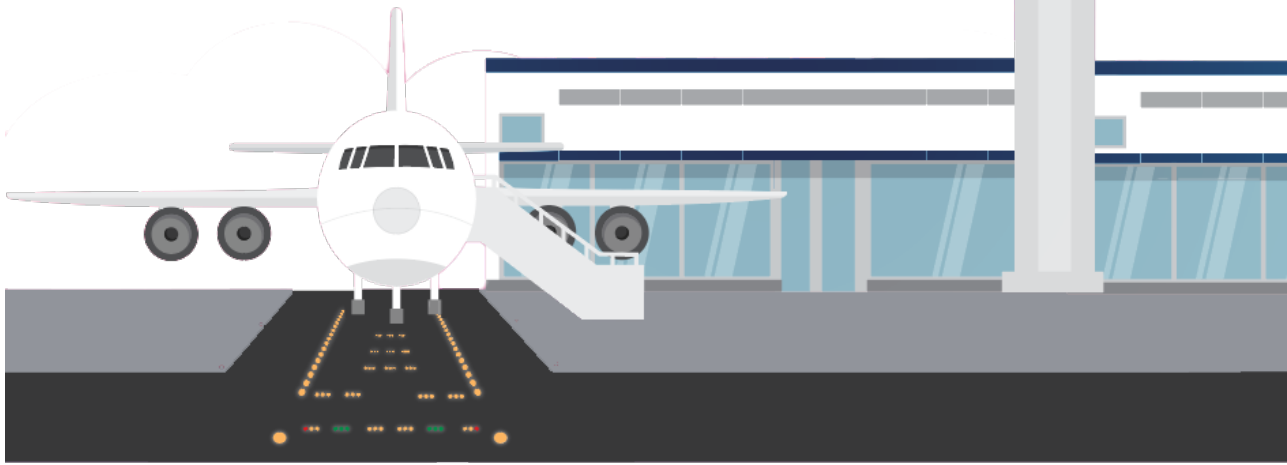
Provinsi	April 2019	April 2020	April 2021	Penurunan % TPK 2020	Kenaikan TPK % 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(4)-(3)
DI Yogyakarta	62.75	5.36	36.78	-57.39	31.42
Bali	60.33	3.22	10.09	-57.11	6.87
Sulawesi Utara	65.7	13.98	43.01	-51.72	29.03
Lampung	62.37	13.94	40.78	-48.43	26.84
Sumatera Barat	56.22	9.09	35.23	-47.13	26.14

Sumber: BPS (diolah)

KINERJA DAERAH

Jumlah Kunjungan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk

Terbatasnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai akibat kebijakan penanggulangan Covid-19 masih terjadi hingga September 2021. Bali mengalami penurunan terbesar selama pandemi. Adapun angka 2020, masih sedikit tertolong dengan angka kedatangan sebelum pandemi di Maret 2020. Agaknya kunjungan wisman di 2021, menyebabkan recovery sektor pariwisata Bali masih belum terasa.



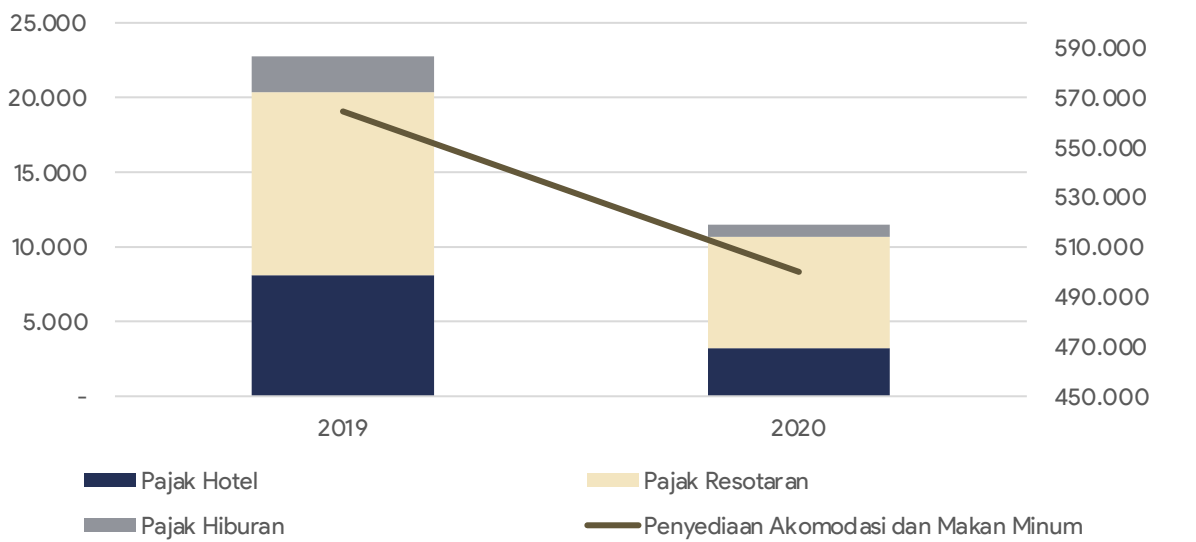
Bandara	2019	2020	2021 (s.d. September)
Ngurah Rai	6,239,543	1,059,198	35
Soekarno-Hatta	2,419,196	435,139	69,696
Juanda	243,899	35,035	652
Kualanamu	244,530	41,427	218
Husein Sastranegara	157,833	31,195	1
Adi Sucipto	113,028	18,653	-
Bandara Int. Lombok	57,763	12,550	29
Sam Ratulangi	130,285	23,281	11,401
Minangkabau	61,131	11,258	-
Sultan Syarif Kasim II	34,419	6,840	101
Sultan Iskandar Muda	28,303	10,351	9
Ahmad Yani	23,977	4,953	8
Supadio	22,500	4,478	-
Hasanuddin	17,771	3,598	-
Sultan Badaruddin II	15,846	2,601	1,281
Pintu Udara Lainnya	24,682	13,015	394
Total Pintu Udara	9,834,706	1,713,572	83,825

Sumber: BPS (diolah)

KINERJA DAERAH

Pajak Daerah Dan PDRB Sektor Pariwisata

Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Hotel Berbintang Jumlah Kunjungan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk menjadi proksi indikator kondisi pendapatan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; serta pajak daerah sektor wisata meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 11,42%, sedangkan pajak daerah sektor wisata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 49,61%.



Sumber: BPS (diolah)



freepik.com

KINERJA DAERAH

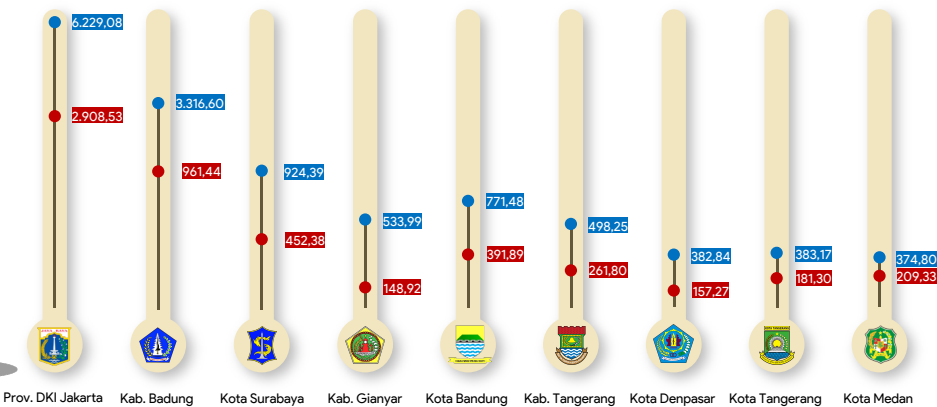
Top Daerah Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata dan Dampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka serta Tingkat Kemiskinan

Dampak penurunan PDRD sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan Pajak Daerah sektor wisata dialami sangat dalam oleh hampir semua daerah di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang secara nominal mengalami penurunan pajak daerah paling dalam atau setara dengan 53,31%. Hal ini diikuti dengan jumlah kemiskinan yang bertambah naik sebesar 115.310 orang. Untuk level kabupaten/kota, daerah yang nominalnya terdampak paling dalam adalah Kab. Badung atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 71,01%

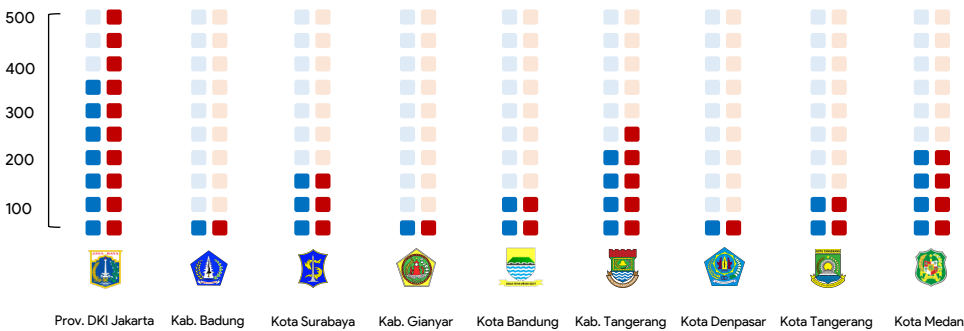


Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata (miliar Rp)

2019 2020



Tingkat Kemiskinan (ribu orang)



Namapemda	Pajak Daerah Sektor Pariwisata (miliar Rp)			Kemiskinan (ribu orang)		
	2019	2020	Selisih	2019	2020	Selisih
Prov. DKI Jakarta	6.229,08	2.908,53	- 3.320,55	365,55	480,86	115,31
Kab. Badung	3.316,60	961,44	- 2.355,15	11,89	13,75	1,86
Kota Surabaya	924,39	452,38	- 472,01	130,55	145,67	15,12
Kab. Gianyar	533,99	148,92	- 385,07	19,85	21,01	1,16
Kota Bandung	771,48	391,89	- 379,59	84,67	100,02	15,35
Kab. Tangerang	498,25	261,80	- 236,45	193,97	242,16	48,19
Kota Denpasar	382,84	157,27	- 225,57	19,83	20,48	0,65
Kota Tangerang	383,17	181,30	- 201,87	98,37	118,22	19,85
Kota Medan	374,80	209,33	- 165,46	183,79	183,54	- 0,25

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

KINERJA DAERAH

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dampak pandemi telah meningkatkan angka pengangguran terbuka. Hal ini sangat terasa di daerah yang memiliki sektor utama berupa sektor pariwisata. Salah satu yang dapat dilihat adalah Bali yang mengalami peningkatan TPT sangat besar dari hanya 1,57% di Agustus 2019, melonjak menjadi 5,6% di Agustus 2020. Angka ini belum mengalami perbaikan secara signifikan di 2021, sebagai akibat belum pulihnya pariwisata Bali yang dijelaskan sebelumnya.

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Februari 2021	Selisih (naik) TPT 2020	Selisih (turun) TPT 2021
DKI JAKARTA	6.54	10.95	8.51	4.41	-2.44
BALI	1.57	5.63	5.42	4.06	-0.21
KEP. RIAU	7.5	10.34	10.12	2.84	-0.22
BANTEN	8.11	10.64	9.01	2.53	-1.63
JAWA BARAT	8.04	10.46	8.92	2.42	-1.54
INDONESIA	5.23	7.07	6.26	1.84	-0.81

Sumber: BPS (diolah)



EDITORIAL

Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian

Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia untuk pertama kalinya mengalami resesi sejak krisis moneter 1998. Penurunan ekonomi dipicu oleh merebaknya pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan pada Maret 2020. Masuknya Covid tersebut ke Indonesia menyebabkan pertumbuhan kuartal pertama 2020 menurun dari rata-rata pertumbuhan year-on-year (YoY) sebesar 5,0% menjadi 3,0%. Hal ini diikuti oleh kontraksi berturut-turut sebesar 5,3% pada kuartal 2 2020 dan 3,5% pada kuartal 3 2020, yang membawa pertumbuhan kumulatif menjadi -2,0%. Konsumsi swasta, investasi, dan ekspor menurun akibat dampak pandemi terhadap aktivitas bisnis. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdapat terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkonsentrasi, komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Dengan menurunnya semua sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut merupakan respons pemerintah atas peristiwa luar biasa berupa wabah Covid dan paket kebijakan ekonomi dalam Perppu tersebut bersama-sama dengan kebijakan kesehatan digunakan untuk penanganan Covid-19.

Di dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah melakukan tambahan belanja dan pembiayaan sebesar **total Rp405,1 triliun** yang belum ada di APBN 2020. Anggaran tersebut masing-masing terdiri dari tambahan belanja adalah **Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp110 triliun, perlindungan sektor industri Rp70,1 triliun** dan untuk **penanganan pembiayaan penjaminan serta restrukturisasi industri** untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional **Rp150 triliun**. Namun demikian, jumlah tersebut bertambah lagi menjadi total sebesar Rp695,8 triliun seiring dengan makin besarnya dampak pandemic Covid terhadap perekonomian. Dari anggaran tersebut realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp 575,8 triliun atau 82,83% dari alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. **Program PC-PEN tahun 2020** tersebut dikelompokkan ke dalam **6 klaster** dengan realisasi **klaster perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 216,6 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp 65,2 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp 62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun**.

Seiring dengan dampak pandemi Covid terhadap perekonomian masih berlanjut dimana pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 mencapai -0,74%, Program PC PEN diteruskan pada tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp744,77 triliun. Per 12 November 2021, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 483,91 triliun atau sama dengan 65% dari pagu Rp 744,77 triliun. Realisasi anggaran PC PEN tersebut terdiri dari realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 129,30 triliun atau 60,1% persen dari pagu anggaran. Anggaran tersebut utamanya untuk diagnostik *tracing dan testing*, perawatan, dan vaksinasi. Kemudian, realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp 139,04 triliun atau 74,5% dari pagu anggaran. Selanjutnya, realisasi program prioritas sebesar 63,1% atau Rp 74,39 triliun, klaster dukungan UMKM dan korporasi mencapai 48,5% atau Rp 78,73 triliun, dan klaster insentif usaha mencapai 99,4% atau Rp 62,47 triliun. Program PC PEN dapat dikatakan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kejatuhan yang lebih dalam dan membantu masyarakat, baik secara individu maupun korporasi, bertahan menghadapi pandemi Covid. Salah satu sektor yang terdampak Covid paling dalam adalah sektor pariwisata karena adanya pembatasan mobilitas dan larangan masuk bagi wisatawan asing sehingga jumlah wisatawan mancanegara turun drastis sebesar 84%. Program PC PEN juga diarahkan untuk membantu sektor pariwisata dengan total pagu anggaran sebesar Rp2,4 triliun.



EDITORIAL

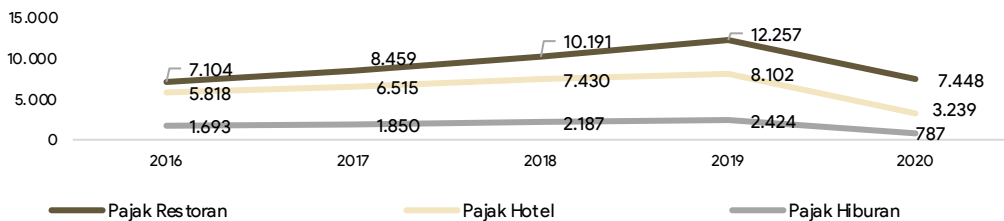
Dampak COVID-19 Secara Umum terhadap Pajak Daerah Sektor Wisata

Pandemi COVID-19 jelas memberi hantaman keras bagi sektor pariwisata. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), badan PBB untuk sektor pariwisata, melaporkan bahwa di tahun 2020 jumlah perjalanan wisata turun sebesar sekitar 1 miliar perjalanan atau 84%. PDB dunia juga kehilangan sekitar USD 2 triliun, yang merupakan akibat dari adanya penutupan perbatasan baik domestic maupun internasional, pembatasan visa, dan kebijakan karantina. Pariwisata di negara-negara di Asia Tenggara bahkan merupakan wilayah yang terdampak paling parah.

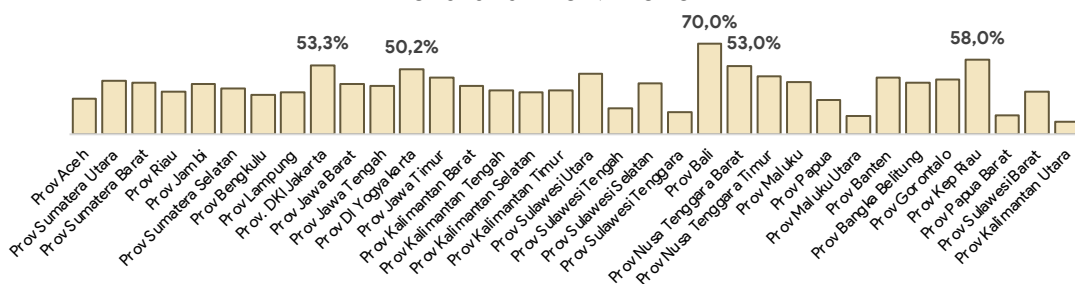
Di Indonesia, dampak tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Kemenparekraf dalam Buku Tren Pariwisata 2021 menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara di Bandara Ngurah Rai Bali, sebagai bandara dengan pengunjung terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 500.000 kunjungan wisman di Januari 2020, menjadi 0 (nol) pada April 2020. BPS (2020) menyebutkan bahwa sebanyak 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan, yang tentu saja menyebabkan adanya *multiplier effect* bagi sektor perekonomian lainnya.

Bagi Pemda, tren pajak daerah untuk sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan juga “terhempas”, seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

Perkembangan Pajak Sektor Pariwisata Nasional



Penurunan 2019-2020



Dari grafik 1 terlihat bahwa secara nasional, Pajak Restoran turun sekitar 40% dari 12,25 triliun ke 7,4 triliun, sedangkan pajak Restoran dan Pajak Hiburan turun sekitar 60%. Dari total ketiga jenis pajak tersebut, Pajak Restoran memiliki porsi terbesar yaitu sebesar 64%, sehingga meskipun penurunannya secara persentase paling kecil, namun secara nilai rupiah penurunan ini menyebabkan penurunan pajak daerah sektor pariwisata turun sebesar 42%. Grafik 2 menunjukkan penurunan tersebut per-provinsi se Indonesia. Terlihat bahwa Bali terdampak terbesar hingga 70%, diikuti dengan Kep. Riau, DKI Jakarta, dan Prov NTT dan DI Yogyakarta. Daerah-daerah tersebut memang dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan.

EDITORIAL

Tantangan Sektor Pariwisata

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini. Setidaknya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam memulihkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata.

Pertama, mobilitas masyarakat yang masih terbatas memerlukan adanya inovasi dari usaha-usaha di sektor pariwisata. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kebijakan *social distancing* ini mengakibatkan gangguan pada rantai dunia usaha termasuk pada sektor pariwisata. Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) dampak dari pembatasan mobilitas terhadap sektor pariwisata, yaitu penurunan tingkat okupansi hotel dan restoran, yang kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan daerah dari pajak perhotelan dan restoran, serta adanya penurunan pendapatan sektor UMKM. Ketiga hal tersebut memerlukan berbagai inovasi untuk dapat bertahan dan memulihkan situasi dalam kondisi pandemi ini. Inovasi tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pemanfaatan teknologi untuk pemasaran sektor usaha pariwisata maupun untuk meyakinkan masyarakat atau wisatawan bahwa destinasi yang dituju tersebut telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Tantangan ketiga adalah bagaimana industri pariwisata mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru/ *new normal* dalam situasi pandemi maupun jika nanti berubah menjadi endemi. Industri pariwisata baik itu hotel, restoran maupun UMKM perlu terus didorong untuk mampu beradaptasi dan berstrategi untuk menghadapi era normal baru dimaksud.

Rekomendasi

Untuk mendukung perekonomian secara keseluruhan, ekspor dan pengeluaran pemerintah diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mendukung dan kebijakan moneter yang akomodatif akan membantu menopang pertumbuhan. Konsumsi swasta diproyeksikan baru sedikit pulih tahun ini sebelum naik sebesar 5,0% tahun depan. Selain itu, investasi diharapkan menguat seiring dengan normalnya kondisi dan perbaikan iklim usaha. Oleh karena itu, langkah-langkah pemulihan ekonomi dalam program PC PEN sangat penting untuk dikedepankan guna menahan pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, insentif untuk sektor pariwisata, antara lain bantuan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan relaksasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di sektor pariwisata tetap dilanjutkan.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, di era pandemic, maka objek wisata dengan “physical distancing” dapat menjadi pilihan seperti pertama, *drive-in cinema*, yang sudah dipraktekkan di Lippo Cikarang dimana pengunjung dapat menonton film dari mobil. Pilihan kedua, misalnya *Virtual event* seperti virtual concert juga sudah semakin lazim dilaksanakan. Ketiga, wisata *staycation*, yaitu pengunjung berlibur dengan hanya menginap di hotel yang telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan menyediakan fasilitas seperti hiburan anak, atau di-*bundling* dengan paket lainnya seperti penerbangan dan area bermain seperti yang dilakukan oleh Trans Luxury Hotel.

Kedua, memulihkan sektor pariwisata untuk kembali bergeliat memiliki tantangan lain berupa belum optimalnya *demand* dari wisatawan selain dari adanya *social distancing policy* maupun karena turunnya daya beli masyarakat. Jika hotel maupun restoran tetap beroperasi di tengah keterbatasan tersebut, yang terjadi adalah bertambahnya angka pengangguran karena ketidakmampuan pengusaha sektor pariwisata untuk menutup biaya operasionalnya. Oleh karena itu, strategi eksisting yang ditempuh adalah melalui program kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut telah dilakukan misalnya melalui program hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun pelaku industri pariwisata. Penyaluran program tersebut diterima oleh sebanyak 4.372 Industri Hotel dan 4.118 Industri Restoran dengan penggunaan untuk belanja gaji operasional personalia (gaji, upah dan tunjangan) sebesar 59,46% pada industri hotel dan 57,15% pada industri restoran.



INOVASI DAERAH

Inovasi Program Pemulihan Sektor Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali

Dampak besar Pandemi Covid bagi sektor pariwisata di Bali adalah obyek pariwisata sepi pengunjung, tingkat hunian hotel turun drastis dan restoran pun juga sepi pengunjung. Sebagai provinsi yang bertumpu dan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata, membuat Bali menjadi daerah paling terdampak secara ekonomi. Pada tahun 2020, sektor pariwisata dan perekonomian Bali, pertumbuhan perekonomiannya mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -9,3% akibat imbas Pandemi Covid tersebut.

Bersiap menghadapi kebangkitan kembali sektor pariwisata yang ditandai dengan semakin terkendalinya kasus harian covid 19, Pemprov Bali telah menyiapkan beberapa langkah, yaitu **inovasi produk dan destinasi wisata** yang sesuai dengan *trend* industri pariwisata. Langkah selanjutnya adalah **adaptasi dan kolaborasi**, dengan **berfokus pada segmen dalam negeri terlebih dahulu**. Adaptasi dilakukan dengan tetap disiplin protokol kesehatan 3M dengan mendorong Destinasi bersertifikasi CHSE (*clean, health, safety, and environmental sustainability*).

Pandemi telah mengubah *trend* pariwisata dari *mass tourism* ke *sustainable tourism*. *Preferensi traveling juga berubah menjadi customized, personalized, localized, dan smaller in size* untuk mengurangi *transit* dan *contactless*. Untuk itu program pariwisata yang disiapkan Pemprov Bali dan banyak dicari adalah pariwisata berbasis budaya dan berbasis alam terbuka (*nature* dan *culture*). Program lain yang disiapkan adalah destinasi yang didasari *free covid corridor*, dimana destinasi di daerah zona hijau sudah mulai dibuka untuk pariwisata mancanegara. Untuk itu, Bali telah menyiapkan dua area untuk penerapan *free covid corridor*, yaitu di Nusa Dua dan Ubud.

Inovasi Pemerintah Provinsi Bali



Program Work From Bali (WFB)

Work From Bali adalah program dari pemerintah yang mengajak masyarakat untuk bekerja dari Bali. Pada tahap awal, lokasi yang dipilih untuk WFB adalah Kawasan Nusa Dua yang merupakan kawasan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni *Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC)*. Lokasi *Work From Bali* saat ini adalah *Work From* Karangasem, *Work From* Gianyar dan Bangli, *Work From* Klungkung dan Nusa Penida, *Work From* Denpasar, *Work From* Badung, *Work From* Tabanan, dan *Work From* Singaraja. Program WFB ini diinisiasi oleh pemerintah bekerjasama dengan Pemprov Bali untuk membantu sektor pariwisata Pulau Dewata yang terdampak pandemi Covid-19. Program WFB memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pariwisata di Bali yang perlahan bangkit dan ditargetkan sebagai pertolongan pertama untuk sektor pariwisata Bali. Dengan hadirnya WFB di Bali, diharapkan ada peningkatan keterhunan hotel dan memiliki efek multipler yang sangat besar bukan hanya dari perhotelan dan restoran, tapi juga dari produk-produk ekonomi kreatif. Program WFB ini tidak hanya untuk ASN namun juga kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan rintisan atau *startup*.



Program Hotel Isolasi Mandiri

Pemprov Bali memberikan kemudahan bagi pelaku industri perhotelan untuk menampung pasien yang dinyatakan positif covid 19. Masyarakat yang terpapar covid dan tidak memiliki gejala berat kemudian memutuskan melakukan isolasi mandiri **ditawarkan paket isolasi mandiri di hotel**. Hotel yang bersertifikasi CHSE dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit untuk menyediakan paket isolasi mandiri yang ditangani langsung oleh Dokter & Tim Medis dari RS. Seluruh proses penanganan isoman wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selama isoman mendapatkan penanganan khusus untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan baik tamu Isoman maupun karyawan hotel. Perkembangan pasien terus dipantau oleh tenaga kesehatan RS dari perawatan sampai dinyatakan negatif atau sembuh dari covid 19. Selain membantu menangani pasien bergejala ringan yang tidak tertampung di RS, program ini juga membantu meningkatkan keterisian kamar hotel di Bali.



Program Desa Wisata

Kebangkitan pariwisata juga dapat dimulai dari desa wisata. Pemprov Bali mendorong desa wisata untuk hadir membuka peluang usaha, peluang ekonomi dan membuka lapangan kerja yang selalu-luasnya. Pemprov Bali juga mengarahkan agar desa wisata berinovasi menciptakan konten-konten menarik yang bertujuan untuk mengangkat wajah dan keunggulan desa yang dapat dijual dalam satu paket wisata yang unik dan menarik. Di tahun 2021 ini, **Desa Wisata Carangsari dan Desa Wisata Penglingsingan di Bali memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai 50 desa wisata terbaik di Indonesia**. Melalui desa wisata ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk kembali menghidupkan pariwisata Bali, tidak ada pilihan selain mengendalikan pandemi terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai daerah zona hijau melalui program vaksinasi dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M dan 3T. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan Bali dapat tetap bertahan, mampu mengambil peluang, dan akhirnya menang dari pandemi COVID-19 sehingga sektor pariwisata di Bali dapat segera pulih dan bangkit kembali serta mampu tumbuh seperti sebelum pandemi. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian Bali.

KABAR DAERAH

PDRD DI MASA PANDEMI

<https://www.padang.go.id>
(diunduh 05 November 2021)

Pandemi covid-19 membuat *governement expenditure* lemah karena adanya *refocusing* anggaran. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2020 juga mengalami perlambatan cukup signifikan sebesar -1,86% jika dibandingkan dengan 5,65% (2019), meskipun perlambatan ini masih jauh di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat (menurut perkiraan sementara). Perlambatan ini masih tertolong oleh laju pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan, pertanian dan jaminan sosial wajib menurut Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha sebesar 11,52% yang naik cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,06% (naik 6,46%).

Di tahun 2020 terjadi hal yang mengejutkan yaitu perubahan komposisi distribusi PDRB. Jika semula sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di tahun 2019 (17,17% dari total PDRB), maka di tahun 2020 yang lalu justru sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kembali menjadi sektor dengan kontribusi terbesar (16,41% dari total PDRB). Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 15,66% dari total PDRB.

Namun secara umum distribusi nilai PDRB Kota Padang atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020 masih didominasi oleh 5 sektor utama yaitu ; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,41%), sektor transportasi dan pergudangan (15,66%), sektor industri pengolahan (11,87%), sektor konstruksi (10,44%) dan sektor informasi dan komunikasi (8,22%). Ke 5 sektor ini menguasai 62,60% PDRB Kota Padang, sedangkan 12 sektor lainnya tersebar pada penguasaan sisanya yaitu 37,40%.

<https://iagapapua.com>
(diunduh 05 November 2021)

Pada hari Kamis, 03 September 2021, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat mengakui bahwa pendapatan dari pengelolaan objek wisata di Raja Ampat menurun hingga 'nol persen' semenjak wabah Covid-19. Dampak kerugian itu sangat dirasakan masyarakat lokal setempat, sebab wisatawan domestik, regional, nasional dan mancanegara tidak berkunjung ke Raja Ampat secara khusus dan Papua Barat pada umumnya. Sebelum adanya virus corona wisatawan asing lebih dominan berwisata ke Raja Ampat, namun karena adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan daya tarik wisatawan kesana menurun. Dia mengklaim bahwa saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan ke Raja Ampat, mengingat akses transportasi udara dan laut sudah mulai dibuka secara bertahap. Hanya saja, kata dia, setiap wisatawan yang hendak berwisata ke Raja Ampat tentu harus mematuhi SOP di dijanjurkan.

<https://jogja.genpi.co>
(diunduh 05 November 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dan semakin parah akibat adanya kebijakan PPKM. Pada akhir September 2021, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul mengatakan akibat pandemi yang mewabah ini PAD dari pariwisata menurun setiap tahun bahkan untuk pelaku wisata tidak ada pemasukan sama sekali. PPKM Darurat yang diberlakukan pada 3 Juli 2021 menyebabkan dampak yang paling terasa yaitu destinasi wisata ditutup sehingga aktivitas pariwisata berhenti total. Pada tahun 2019, PAD sektor wisata mencapai Rp25 miliar dengan jumlah kunjungan tercatat ada 3,8 juta turis namun pada 2020 menurun menjadi Rp14,2 miliar dengan adanya pembatasan operasional wisata. Hingga September 2021 ini PAD dari sektor baru mendapatkan Rp8,4 miliar dari target PAD pariwisata sebesar Rp12 miliar (sebelumnya revisi targetnya Rp16 miliar).

KABAR DAERAH

PDRD DI MASA PANDEMI

<https://www.cnnindonesia.com>
(diunduh 05 November 2021)

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menyatakan pariwisata Bali berpotensi merugi hingga Rp138,6 triliun atau US\$9 miliar (mengacu pada kurs Rp15.400 per dolar AS) akibat pandemi virus corona, dimana kerugian sepanjang 2020 yang paling besar adalah wisata tirta. Penurunan pendapatan pariwisata Bali telah terjadi sejak Februari 2020. Tren penurunan terus terjadi pada Maret 2020, angka wisman anjlok sebesar 42,32 persen. Sementara untuk April, per 13 April 2020 dilaporkan penurunan kunjungan sebesar 93,24 persen. Bali merupakan provinsi yang mengalami pukulan terdalam di sektor pariwisata karena corona karena lebih dari 60 persen dari pendapatan masyarakat Pulau Dewata berasal dari sektor tersebut. Tidak hanya sektor turunan pariwisata seperti perhotelan yang menanggung rugi, sektor pertanian pun ikut tergilas oleh virus corona.

<https://www.merdeka.com>
(diunduh 05 November 2021)

Jumlah pengunjung Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah turun drastis di 2020 dibanding 2019 akibat pandemi Covid-19. Menurut General Manager Taman Wisata Candi Borobudur, jumlah pengunjung pada 2019 mencapai 4,39 juta orang, sementara pada 2020 hanya dikunjungi 996 ribu orang. Dari 996 ribu pengunjung tersebut, sebanyak 31 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara, sedangkan sisanya wisatawan Nusantara. Akibat pandemi, Taman Wisata Candi Borobudur sempat ditutup sekitar empat bulan. Pada awal dibuka kembali 25 Juni 2020 secara perlahan ada kenaikan kuota yang diberikan dan sampai sekarang kuota yang diberikan sebanyak 4.000 pengunjung per hari.

Pada 2021 ini berharap ada kenaikan jumlah pengunjung Candi Borobudur seiring dengan nantinya masyarakat diberikan vaksin Covid-19. Guna memanjakan pengunjung, Kementerian PUPR siap melebarkan jalan utama dari pintu utama menuju halaman Candi Borobudur, pembenahan gerbang utama, serta akan diberikan atraksi-atraksi menarik yang telah disiapkan.

<https://www.sinjailkab.go.id>
(diunduh 05 November 2021)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sinjai yang berasal dari pendapatan retribusi daerah di bidang pariwisata pada tahun 2020 melampaui target atau mencapai realisasi sebesar 145,04 persen. Realisasi ini meningkat dibanding tahun lalu yang capaiannya 101 persen. Capaian ini diperoleh dari retribusi tiket masuk untuk lima obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sinjai yakni masing-masing Taman Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara, Tahura dan Air Terjun Kembar Batu Barae di Sinjai Borong, Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur dan Air Terjun Lembang Saukang di Kecamatan Tellulimpoe. Capaian ini tidak lepas dari kerja tim yang telah dibentuk oleh Disparbud Sinjai dalam melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam meningkatkan jumlah wisatawan meski dalam pandemi Covid-19 yaitu dengan syarat pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan protokol kesehatan di lokasi obyek wisata.

KABAR DAERAH

PDRD DI MASA PANDEMI

<https://kumparan.com>
(diunduh 05 November 2021)

Selama pandemi COVID-19 melanda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Kabupaten Manggarai, NTT, mengalami penurunan. Merujuk pada data tahun 2019, target PAD dari sektor pariwisata Kabupaten Manggarai sebesar Rp 150 juta. Namun yang terealisasi hanya Rp 114.105.000 atau 76%. Sedangkan pada tahun 2020, pihaknya targetkan Rp 150 juta, yang terealisasi hanya Rp 4.832.000 atau 3,2%. Sedangkan pada tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai menargetkan PAD sektor pariwisata sebesar Rp 100 juta, dan yang terealisasi sementara Rp 18.155.000, atau 18,1%. Tahun 2021 objek wisata yang sudah siap menerima tamu adalah Kampung Adat Todo dan Wae Rebo, sedangkan yang lain masih dibenahi. Pengunjung yang datang tidak lagi dibatasi, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai melaksanakan lima program prioritas. Pertama, program pengembangan destinasi pariwisata dengan indikator berupa meningkatnya pengembangan objek wisata. Kedua, program pengembangan pemasaran pariwisata dengan indikator berupa meningkatnya arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai. Target selama 1 tahun dengan realisasi 100%. Ketiga, program pengembangan kemitraan dengan indikator berupa terwujudnya kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keempat, program pengelolaan kekayaan budaya dengan indikator berupa terwujudnya pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya yang optimal. Kelima, program pengelolaan keragaman budaya dengan indikator adalah terwujudnya penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah.

<https://jateng.antaranews.com>
(diunduh 05 November 2021)

Pendapatan sektor wisata khususnya objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melampaui target yang ditetapkan di tengah pandemi COVID-19, kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas Asis Kusumandani. Pendapatan seluruh objek wisata milik Pemkab Banyumas ditargetkan sebesar Rp12,6 miliar pada tahun 2020 dan karena adanya pandemi COVID-19, target pendapatan ini sempat diturunkan menjadi Rp3,6 miliar. Berdasarkan data hingga minggu kedua bulan Desember 2020, pendapatan dari seluruh objek wisata milik Pemkab Banyumas telah mencapai Rp3,8 miliar. Objek wisata tersebut kembali dibuka, dan diberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah pengunjung pun dibatasi. Sistem pembayaran untuk tiket masuk dilakukan secara nontunai.

KAJIAN DAERAH



Pendahuluan

Melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pendapatan asli daerah. Namun, tingkat kemandirian daerah dari sisi pemungutan pendapatan asli daerah masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan kualitas dari manajemen perpajakan di daerah yang diwakili oleh dua variabel, yaitu dukungan regulasi dan keandalan basis data wajib pajak, yang diukur berdasarkan nilai yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2019) berupa persentase penyelesaian rencana aksi oleh Pemerintah Daerah pada area intervensi untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Metodologi

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi bertingkat dengan variabel kuadratik untuk menganalisis pengaruh manajemen pajak daerah terhadap pendapatan pajak daerah. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis data dari pajak daerah kabupaten/kota karena kontribusi pajak daerah di kabupaten/kota masih relatif rendah, jika dibandingkan dengan provinsi.

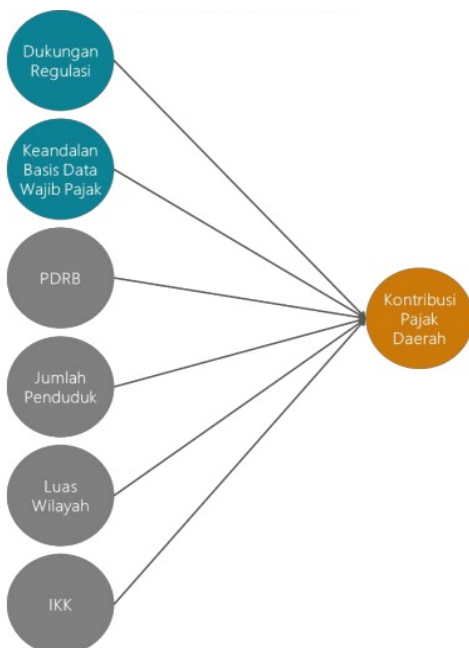


Pembahasan

Penelitian ini menggunakan nilai kualitas manajemen pajak daerah sebagai variabel bebas. Nilai tersebut diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2019) dengan menghitung nilai kualitas manajemen pajak daerah dari dua indikator, yaitu: (i) dukungan regulasi dan (ii) keandalan basis data wajib pajak.

Adapun model analisis yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned}
 KPD_i = & \beta_0 + \beta_1 DR_i + \beta_2 DR_i^2 + \beta_3 BWP_i \\
 & + \beta_4 BWP_i^2 + \beta_5 \ln PDRB_i \\
 & + \beta_6 \ln JP_i + \beta_7 \ln LW_i + \beta_8 IKK_i \\
 & + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$



KAJIAN DAERAH

Pembahasan

Hasil regresi dengan variabel kuadratik menunjukkan bahwa dukungan regulasi (DR) mempengaruhi kontribusi pendapatan pajak daerah dalam bentuk grafik U terbalik (inverted U-shape), sedangkan keandalan basis data wajib pajak mempengaruhi kontribusi pendapatan pajak daerah dalam bentuk grafik U (U-shape).

Berdasarkan hasil di atas, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

- Pada awal implementasi dari regulasi-regulasi yang mendukung penerimaan pajak daerah, regulasi-regulasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun sampai pada suatu titik, penambahan regulasi baru akan mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan pada hasil tersebut, dapat diduga bahwa jika pemerintah daerah mempunyai terlalu banyak regulasi terkait pajak daerah, investor akan menjadi ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut.
- Pada tahap awal, pembangunan basis data wajib pajak mempunyai korelasi negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini dapat diterima karena proses pembangunan basis data wajib pajak membutuhkan banyak sumber daya yang dialokasikan dan difokuskan untuk pembangunan basis data tersebut, sehingga upaya pemungutan pajak menjadi tidak optimal. Namun sampai pada titik tertentu, ketika basis data wajib pajak sudah cukup andal, pengembangan lebih lanjut terhadap keandalan basis data wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan: (i) merumuskan regulasi-regulasi yang mendukung penerimaan pajak daerah dan (ii) membangun basis data wajib pajak yang handal. Akan tetapi, pemerintah daerah harus menyadari bahwa jumlah regulasi terkait penerimaan pajak daerah yang terlalu banyak justru akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi dan dapat menurunkan penerimaan pajak daerah. Kemudian, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang besar untuk membangun basis data wajib pajak yang andal yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah atau panjang. Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah daerah dapat menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga anggaran pembangunan basis data wajib pajak tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD.



REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

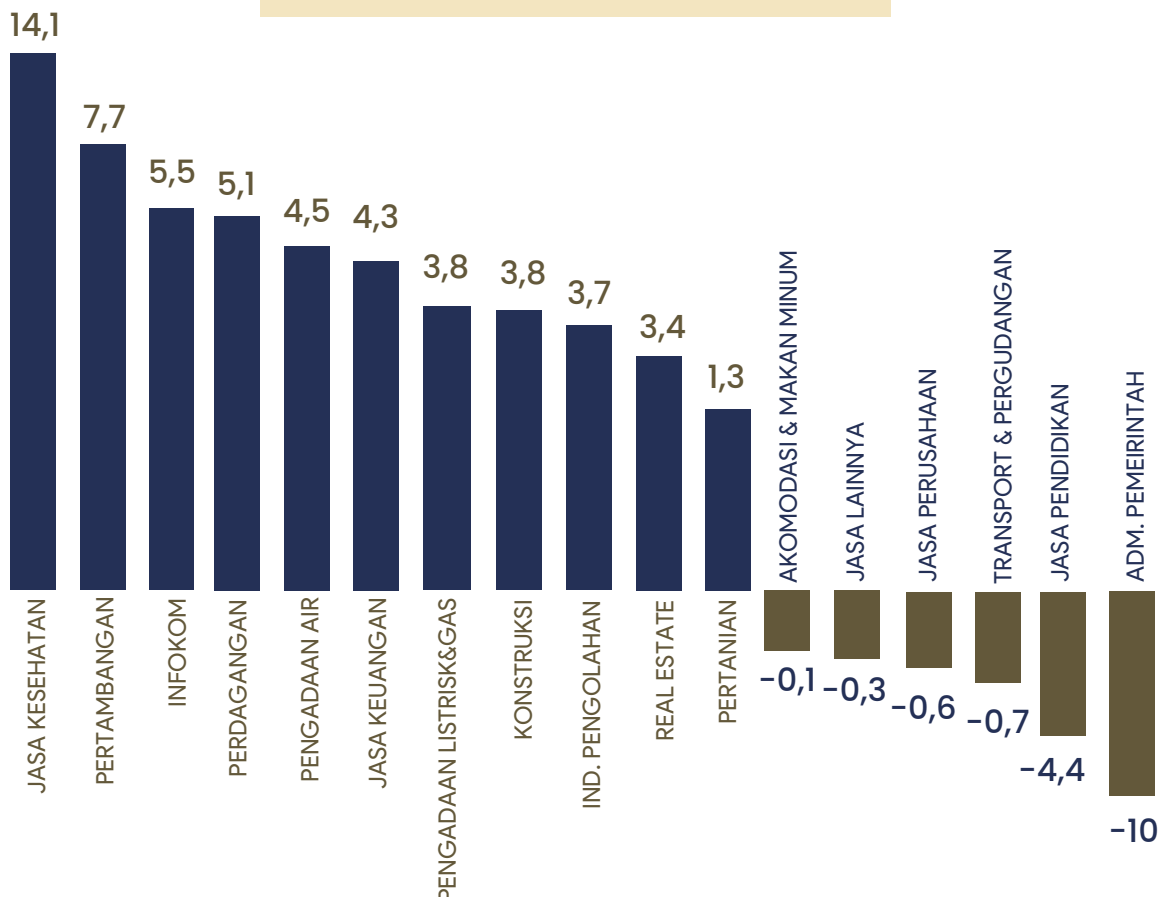
Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB

Menunjuk rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bulan November 2021, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.815,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,23 persen.

Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Namun, Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,55 persen mencatat pertumbuhan sebesar 3,03 persen. Menurut data BPS, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 diperkirakan berada pada angka 4,1 persen. Sementara itu, pada 2019 lalu, kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,7 persen, sementara itu diperkirakan di tahun 2021 diperkirakan sedikit pulih dan berkontribusi sebesar 4,3 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III



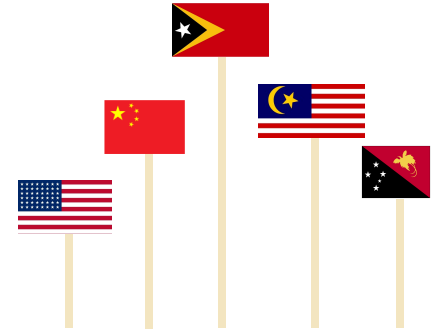
REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Kunjungan Wisata Mancanegara

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan September 2021 berjumlah 126.513 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar -15,08% dibandingkan bulan September 2020 yang berjumlah 148.984 kunjungan.

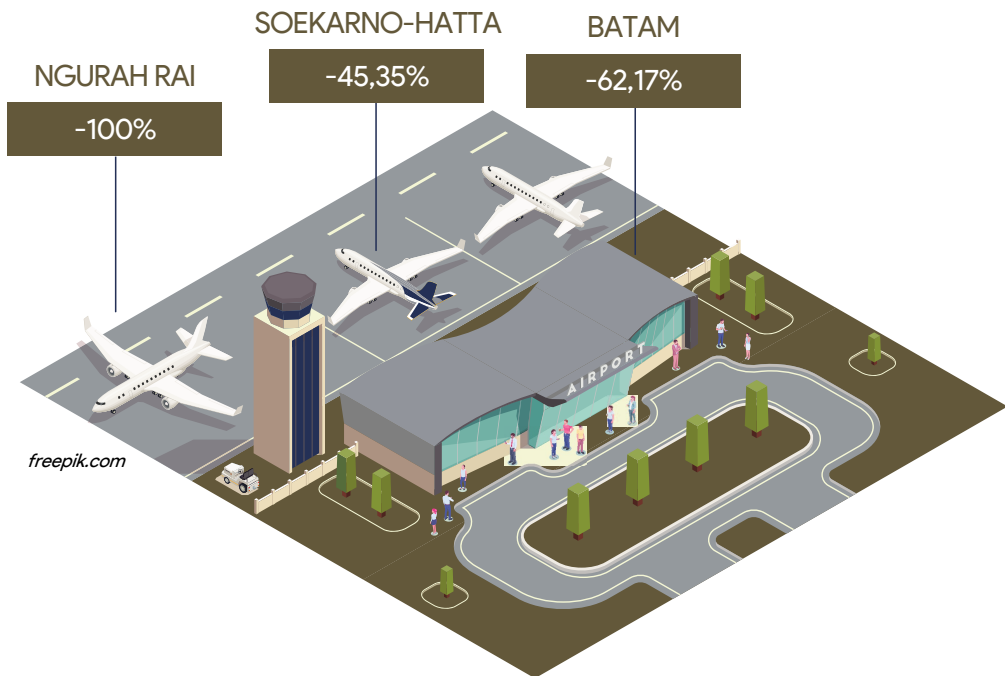


Berdasarkan kebangsaan, jumlah kunjungan wisman bulan September 2021 di seluruh pintu masuk untuk 5 asal negara yang mencatatkan jumlah kunjungan tertinggi adalah: (1) Timor Leste sejumlah 72.937 kunjungan; (2) Malaysia sejumlah 39.819 kunjungan; (3) Tiongkok sejumlah 2.225 kunjungan; (4) Papua Nugini sejumlah 2.190 kunjungan; dan (5) Amerika Serikat sejumlah 1.423 kunjungan. Hal ini dapat dicermati dari infografis pada diagram-1 perkembangan wisatawan mancanegara terbitan Kemenparekraf di bulan September 2021 lalu.



19

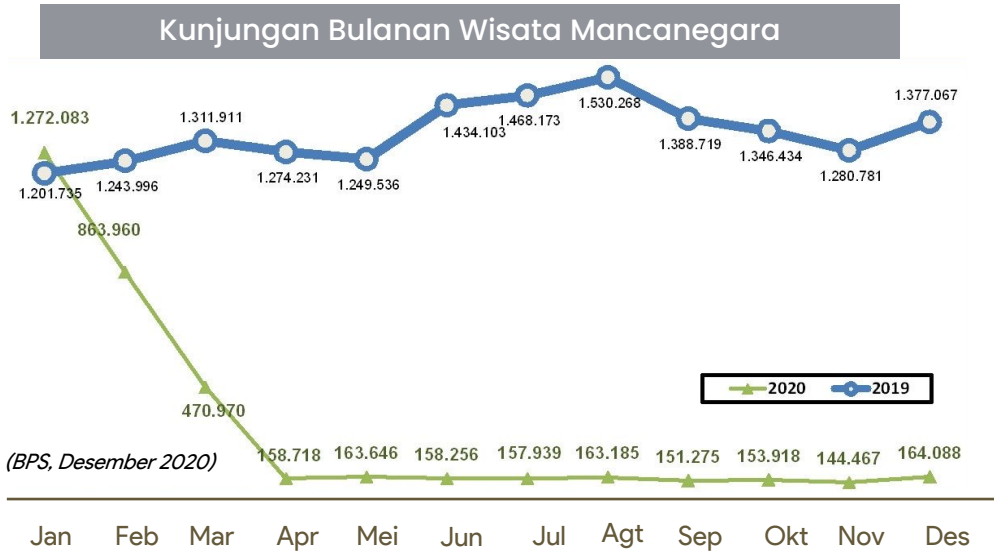
Jumlah & Pertumbuhan Kunjungan pada 3 Pintu Besar



Kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052.923 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan. Kunjungan wisman pada 3 (tiga) pintu besar dari 26 pintu masuk utama tahun 2020 dibandingkan bulan Desember 2019, yaitu: Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar 83,02%; Soekarno-Hatta mengalami penurunan sebesar 82,01%; serta Batam mengalami penurunan sebesar 84,84%. Berdasarkan kebangsaan, jumlah kunjungan wisman tahun 2020 di seluruh pintu masuk tercatat jumlah kunjungan tertinggi, yaitu: Timor Leste sejumlah 994.590 kunjungan, Malaysia sejumlah 980.118 kunjungan, Singapura sejumlah 280.492 kunjungan, Australian 256.291 kunjungan, dan Tiongkok sejumlah 239.768 kunjungan.

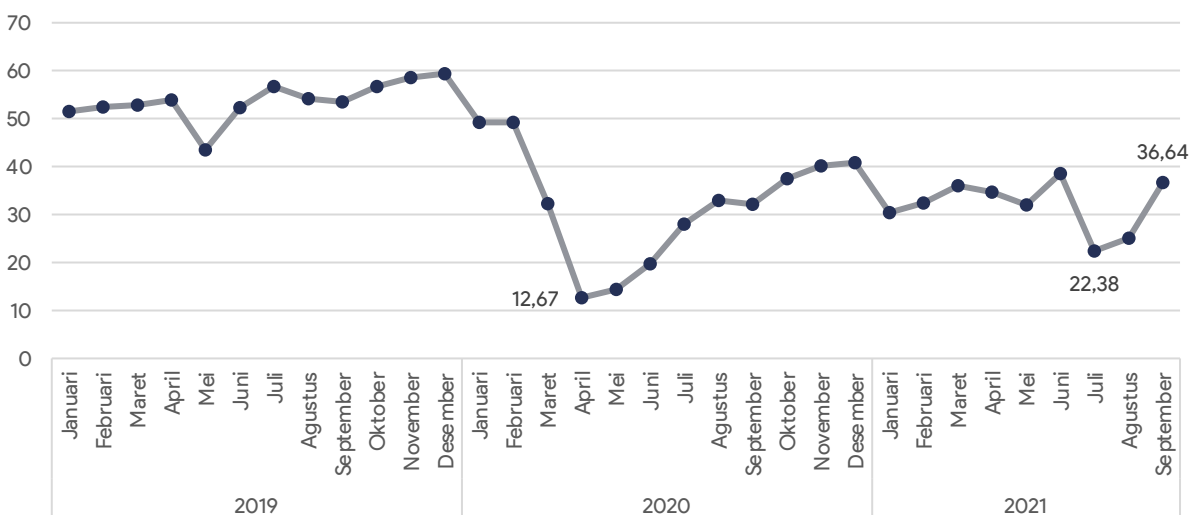
REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Tingkat Penghunian Kamar oleh Wisatawan



Keprihatinan atas capaian kinerja sektor pariwisata, khususnya sub-sektor industri mancanegara dapat dicermati dari Diagram Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2019-2020. Namun demikian ada harapan lain bahwa wisatawan domestik mulai meningkat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada September 2021 mencapai 36,64 persen, naik sebesar 4,52 poin dibandingkan dengan TPK September 2020. TPK September 2021 juga mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu sebesar 11,57 poin jika dibandingkan dengan TPK bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama September 2021 tercatat sebesar 1,59 hari atau turun sebesar 0,14 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada pada September tahun lalu. Pemerintah menargetkan perolehan devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai di angka US\$0,47 miliar sampai US\$1,7 miliar di APBN 2022. Target itu seiring dengan rencana pemerintah untuk membuka kembali sejumlah destinasi pariwisata unggulan pada akhir tahun ini. Sebagaimana pembahasan Penerimaan Negara dalam APBN 2022 dengan DPR sudah disepakati target kontribusi PDB pariwisata 4,3 persen, pada 2022 total nilai devisa US\$0,47 miliar sampai dengan US\$1,7 miliar, yang mana 67% diharapkan diperoleh dari Bali.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang (%)



REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Namun, Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,55 persen mencatat pertumbuhan sebesar 3,03 persen. Hal ini kiranya memberikan gambaran akan kinerja PDRB provinsi Bali yang mana kiranya juga sangat merefleksikan kinerja penerimaan devisa dan negara baik pajak maupun PNPB, sehingga layak untuk mendapat perhatian dari Pemerintah ke depan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Bali kembali mengalami kontraksi sedalam 2,91% pada kuartal III 2021 (*year-on-year/yoy*). Kontraksi ini terjadi setelah sempat bangkit dari masa resesi dengan mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II 2021 sebesar 2,88% (yoy). Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa-Bali diduga berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi Bali di sejumlah kategori lapangan usaha. Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun Produk Domestik Bruto (PDRB), sebanyak 11 kategori mengalami kontraksi pada kuartal III-2021. Secara spasial, daerah yang sektor pariwisata cukup besar, mengalami penurunan TPK signifikan selama pandemi, seperti DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara yang mengalami penurunan TPK lebih dari 50%. Namun demikian, kemampuan recovery secara spasial masih terjadi ketimpangan, khususnya Bali yang masih memiliki kenaikan TPK masih sangat rendah dibandingkan daerah lainnya.

Diagram-5 PDB Provinsi Bali alami *double dips* di Tw-3 2021



Kontraksi terdalam tercatat pada lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan, yaitu minus 16,03%. Kemudian diikuti kontraksi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu minus 8,47%, dan kontraksi pada kategori jasa perusahaan minus 7,53%. Sebanyak 6 kategori lapangan usaha tercatat mampu tumbuh positif secara y-on-y pada kuartal III-2021. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,29%, diikuti kategori pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 2,74%, dan kategori konstruksi sebesar 0,84%.

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif terjadi pada Komponen Impor Luar Negeri yang tercatat mengalami kontraksi sedalam minus 52,02%. Diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar minus 1,09%. Sedangkan komponen pengeluaran lainnya menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan tertinggi dialami oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), yakni sebesar 3,73%, disusul dengan Komponen Pengeluaran LNPRT 2,75%, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 1,15%, dan Komponen Ekspor Luar Negeri tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,49%.

REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

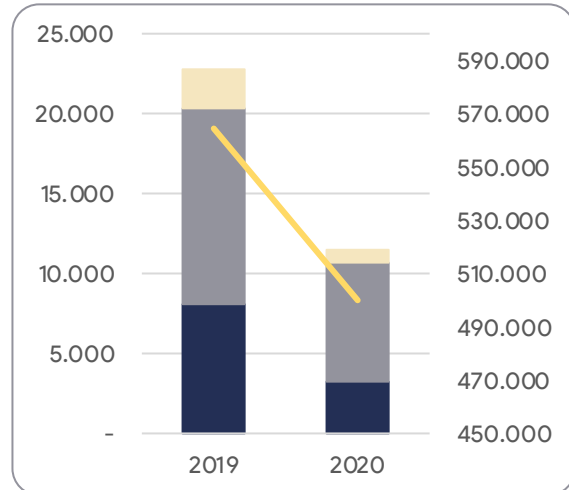
Pajak Daerah dan PDRB Sektor Pariwisata



Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Hotel Berbintang Jumlah Kunjungan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk menjadi proksi indikator kondisi pendapatan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; serta pajak daerah sektor wisata meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 11,42%, sedangkan pajak daerah sektor wisata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 49,61%.

■ Pajak Hotel
 ■ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 ■ Pajak Restoran
 ■ Pajak Hiburan

Diagram-6 Pajak Daerah dan PDRB Sektor Pariwisata 2019-2020
(Kementerian Keuangan dan BPS)



22

Incidence Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka serta Tingkat Kemiskinan

Dampak penurunan PDRD sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan Pajak Daerah sektor wisata dialami sangat dalam oleh hampir semua daerah di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang secara nominal mengalami penurunan pajak daerah paling dalam atau setara dengan 53,31%. Hal ini diikuti dengan jumlah kemiskinan yang bertambah naik sebesar 115.310 orang. Untuk level kabupaten/kota, daerah yang nominalnya terdampak paling dalam adalah Kab. Badung atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 71,01%.

Tabel-1 Incidence Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Kemiskinan

Nama Pemda	Pajak Daerah Sektor Pariwisata (miliar Rp)			Kemiskinan (ribu orang)		
	2019	2020	Selisih	2019	2020	Selisih
Prov. DKI Jakarta	6.229,08	2.908,53	- 3.320,55	365,55	480,86	115,31
Kab. Badung	3.316,60	961,44	- 2.355,15	11,89	13,75	1,86
Kota Surabaya	924,39	452,38	- 472,01	130,55	145,67	15,12
Kab. Gianyar	533,99	148,92	- 385,07	19,85	21,01	1,16
Kota Bandung	771,48	391,89	- 379,59	84,67	100,02	15,35
Kab. Tangerang	498,25	261,80	- 236,45	193,97	242,16	48,19
Kota Denpasar	382,84	157,27	- 225,57	19,83	20,48	0,65
Kota Tangerang	383,17	181,30	- 201,87	98,37	118,22	19,85
Kota Medan	374,80	209,33	- 165,46	183,79	183,54	- 0,25

Dampak pandemi telah meningkatkan angka pengangguran terbuka. Hal ini sangat terasa di daerah yang memiliki sektor utama berupa sektor pariwisata. Salah satu yang dapat dilihat adalah Bali yang mengalami peningkatan TPT sangat besar dari hanya 1,57% di Agustus 2019, melonjak menjadi 5,6% di Agustus 2020. Angka ini belum mengalami perbaikan secara signifikan di 2021, sebagai akibat belum pulihnya pariwisata Bali yang dijelaskan sebelumnya.

REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Tenaga Kerja

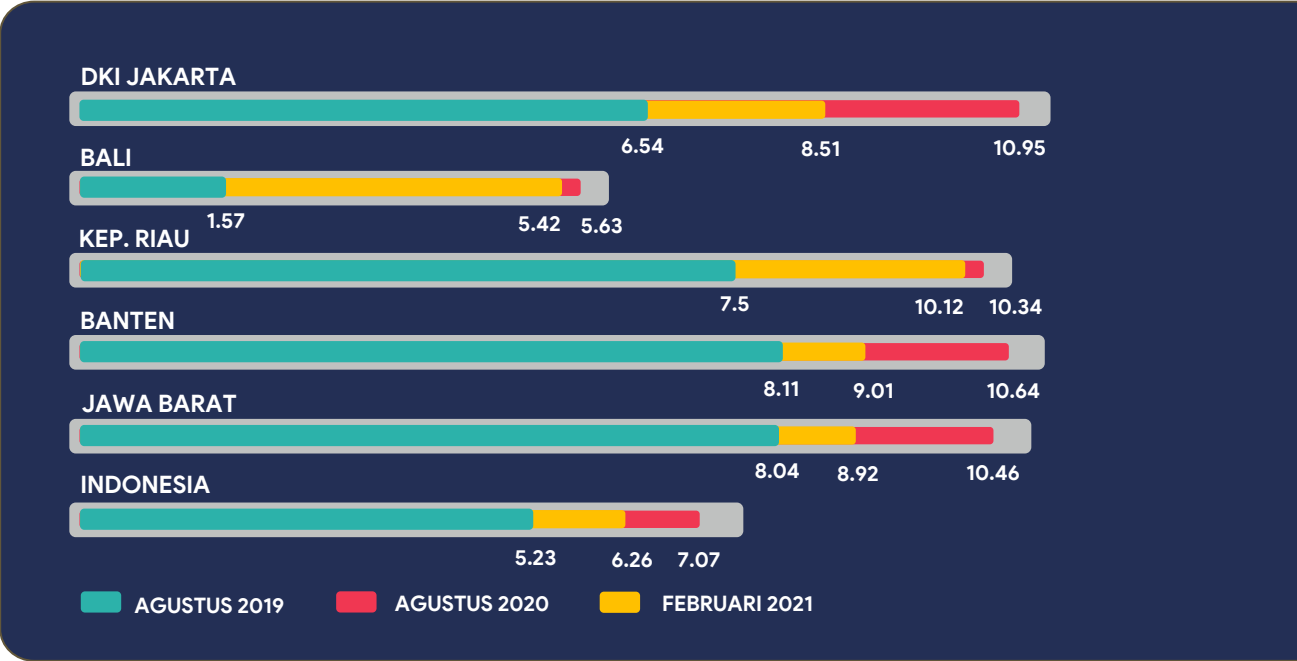


Table-2 Incidence Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Tenaga Kerja

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Februari 2021	Selisih (naik) TPT 2020	Selisih (turun) TPT 2021
DKI Jakarta	6.54	10.95	8.51	4.41	-2.44
Bali	1.57	5.63	5.42	4.06	-0.21
Kep. Riau	7.5	10.34	10.12	2.84	-0.22
Banten	8.11	10.64	9.01	2.53	-1.63
Jawa Barat	8.04	10.46	8.92	2.42	-1.54
Indonesia	5.23	7.07	6.26	1.84	-0.81

Sumber: BPS (diolah)

Tax Incidence (atau kejadian pajak) pada Tabel-1 dan Tabel-2 menunjukkan asersi ekonomi bahwa pembagian beban pajak antara pemangku kepentingan untuk sektor pariwisata di tengah pandemi Covid dua tahun terakhir ternyata justru berdampak pada lapisan masyarakat dengan lapisan penghasilan terbawah. Insiden pajak umumnya terkait dengan elastisitas harga penawaran dan permintaan, yang dalam hal ekonomi pandemi menjadi rusak struktur mekanisme pasar yang ada karena hilangnya kurva permintaan. Hasil permodelan regresi dengan variabel kuadratik oleh anggota Tim Ekonom DJPK menunjukkan bahwa dukungan regulasi (DR) mempengaruhi kontribusi pendapatan pajak daerah dalam bentuk grafik U terbalik (inverted U-shape), sedangkan keandalan basis data wajib pajak mempengaruhi kontribusi pendapatan pajak daerah dalam bentuk grafik U (U-shape).

REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS



Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan indikasi bahwa:

1. Pada awal implementasi dari regulasi yang mendukung penerimaan pajak daerah, regulasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun sampai pada suatu titik, penambahan regulasi baru akan mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan pada hasil tersebut, dapat diduga bahwa jika pemerintah daerah mempunyai terlalu banyak regulasi terkait pajak daerah, investor akan menjadi ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut.



2. Pada tahap awal, pembangunan basis data wajib pajak mempunyai korelasi negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini dapat diterima karena proses pembangunan basis data wajib pajak membutuhkan banyak sumber daya yang dialokasikan dan difokuskan untuk pembangunan basis data tersebut, sehingga upaya pemungutan pajak menjadi tidak optimal. Namun sampai pada titik tertentu, ketika basis data wajib pajak sudah cukup andal, pengembangan lebih lanjut terhadap keandalan basis data wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

24

Dengan demikian, kiranya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan:

1. merumuskan regulasi-regulasi yang mendukung penerimaan pajak daerah dan
2. membangun basis data wajib pajak yang handal.

Akan tetapi, pemerintah daerah harus menyadari bahwa jumlah regulasi terkait penerimaan pajak daerah yang terlalu banyak justru akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi dan dapat menurunkan penerimaan pajak daerah. Kemudian, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang besar untuk membangun basis data wajib pajak yang andal yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah atau panjang. Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah daerah dapat menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga anggaran pembangunan basis data wajib pajak tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD.

Provinsi Bali Sebagai provinsi yang bertumpu dan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata telah menjadi daerah paling terdampak secara PDRB. Pada tahun 2020, sektor pariwisata dan perekonomian Bali, pertumbuhan perekonomiannya mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -9,3% akibat imbas Pandemi Covid tersebut. Berdaptasi dengan Covid 19, Pemprov Bali telah menyiapkan beberapa langkah, yaitu **inovasi produk dan destinasi wisata** yang sesuai dengan *trend* industri pariwisata. Langkah selanjutnya adalah **adaptasi dan kolaborasi**, dengan **berfokus pada segmen dalam negeri terlebih dahulu**. Adaptasi dilakukan dengan tetap disiplin protokol kesehatan 3M dengan mendorong Destinasi bersertifikasi CHSE (*clean, health, safety, and environmental sustainability*).

REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Pandemi telah mengubah *trend* pariwisata dari *mass tourism* ke *sustainable tourism*. *Preferensi traveling* juga berubah menjadi *customized, personalized, localized, dan smaller in size* untuk mengurangi *transit* dan *contactless*. Untuk itu program pariwisata yang disiapkan Pemprov Bali dan banyak dicari adalah pariwisata berbasis budaya dan berbasis alam terbuka (*nature* dan *culture*). Program lain yang disiapkan adalah destinasi yang didasari *free covid corridor*, dimana destinasi di daerah zona hijau sudah mulai dibuka untuk pariwisata mancanegara. Untuk itu, Bali telah menyiapkan dua area untuk penerapan *free covid corridor*, yaitu di Nusa Dua dan Ubud.

Inovasi Pemerintah Provinsi Bali



Inovasi Penerapan Program *Work From Bali* (WFB)

Work From Bali adalah program dari pemerintah yang mengajak masyarakat untuk bekerja dari Bali. Pada tahap awal, lokasi yang dipilih untuk WFB adalah Kawasan Nusa Dua yang merupakan kawasan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni *Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC)*. Lokasi *Work From Bali* saat ini adalah *Work From* Karangasem, *Work From* Gianyar dan Bangli, *Work From* Klungkung dan Nusa Penida, *Work From* Denpasar, *Work From* Badung, *Work From* Tabanan, dan *Work From* Singaraja. Program WFB ini diinisiasi oleh pemerintah bekerjasama dengan Pemprov Bali untuk membantu sektor pariwisata Pulau Dewata yang terdampak pandemi Covid-19. Program WFB memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pariwisata di Bali yang perlahan bangkit dan ditargetkan sebagai pertolongan pertama untuk sektor pariwisata Bali. Dengan hadirnya WFB di Bali, diharapkan ada peningkatan keterhunian hotel dan memiliki efek multiplier yang sangat besar bukan hanya dari perhotelan dan restoran, tapi juga dari produk-produk ekonomi kreatif. Program WFB ini tidak hanya untuk ASN namun juga kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan rintisan atau *startup*.



Inovasi Program Hotel Isolasi Mandiri.

Pemprov Bali memberikan kemudahan bagi pelaku industri perhotelan untuk menampung pasien yang dinyatakan positif covid 19. Masyarakat yang terpapar covid dan tidak memiliki gejala berat kemudian memutuskan melakukan isolasi mandiri **ditawarkan paket isolasi mandiri di hotel**. Hotel yang bersertifikasi CHSE dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit untuk menyediakan paket isolasi mandiri yang ditangani langsung oleh Dokter & Tim Medis dari RS. Seluruh proses penanganan isoman wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selama isoman mendapatkan penanganan khusus untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan baik tamu Isoman maupun karyawan hotel. Perkembangan pasien terus dipantau oleh tenaga kesehatan RS dari perawatan sampai dinyatakan negatif atau sembuh dari covid 19. Selain membantu menangani pasien bergejala ringan yang tidak tertampung di RS, program ini juga membantu meningkatkan keterisian kamar hotel di Bali.

REGIONAL ECONOMIC INSIGHTS

Inovasi Pemerintah Provinsi Bali

**Inovasi Program Desa Wisata**

Kebangkitan pariwisata juga dapat dimulai dari desa wisata. Pemprov Bali mendorong desa wisata untuk hadir membuka peluang usaha, peluang ekonomi dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Pemprov Bali juga mengarahkan agar desa wisata berinovasi menciptakan konten-konten menarik yang bertujuan untuk mengangkat wajah dan keunggulan desa yang dapat dijual dalam satu paket wisata yang unik dan menarik. Di tahun 2021 ini, **Desa Wisata Carangsari dan Desa Wisata Pengringsingan di Bali memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai 50 desa wisata terbaik di Indonesia.** Melalui desa wisata ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

26

Untuk kembali menghidupkan pariwisata Bali, tidak ada pilihan selain mengendalikan pandemi terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai daerah zona hijau melalui program vaksinasi dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M dan 3T. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan Bali dapat tetap bertahan, mampu mengambil peluang, dan akhirnya menang dari pandemi COVID-19 sehingga sektor pariwisata di Bali dapat segera pulih dan bangkit kembali serta mampu tumbuh seperti sebelum pandemi. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian Bali.



Sumber: freepik.com